



Pendidikan Politik sebagai Fondasi Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat Multikultural

Tantia Amanda^{1*}, Hapri Novriza Setya Dhewantoro²

¹Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

²Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

*tantia0129fis.2022@student.uny.ac.id

Abstrak

Pendidikan politik memiliki peran strategis dalam membentuk masyarakat yang demokratis, terutama di tengah keberagaman budaya, etnis, dan agama dalam masyarakat multikultural. Artikel ini membahas bagaimana pendidikan politik dapat menjadi fondasi penting dalam menumbuhkan kesadaran politik, toleransi, dan partisipasi aktif warga negara dalam sistem demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pendidikan politik dan penguatan nilai-nilai demokrasi dalam konteks masyarakat multikultural. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan politik bukan hanya sebuah kebutuhan tambahan, melainkan fondasi esensial dalam menjaga keberlanjutan demokrasi yang sehat, adil, dan inklusif. Dengan demikian, pendidikan politik bukan hanya sebagai sarana transfer pengetahuan politik, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam membangun demokrasi yang berkeadaban dan berkeadilan sosial. Artikel ini merekomendasikan integrasi pendidikan politik dalam berbagai lini kehidupan baik formal maupun nonformal guna memperkuat demokrasi yang adaptif terhadap keragaman dalam masyarakat multikultural.

Kata kunci: pendidikan politik, demokrasi, masyarakat multikultural

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan suku, ras, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Meskipun hidup dengan tatanan kehidupan yang beragam dan majemuk, masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan dalam satu ruang kebangsaan. Fenomena ini menandai lahirnya masyarakat multikultural, sebuah realitas sosial yang tidak bisa dihindari, terutama dalam konteks negara seperti Indonesia yang secara historis dan geografis dibangun di atas fondasi keragaman. Masyarakat multikultural akan terbentuk apabila masyarakatnya memiliki kesadaran yang penuh akan pentingnya kearifan budaya untuk dilestarikan sebagai kehidupan persatuan berbangsa dan bernegara.

Keberagaman Indonesia, di satu sisi menjadi potensi besar bagi lahirnya kreativitas sosial, inovasi kebijakan, dan

solidaritas lintas identitas. Namun di sisi lain, perbedaan identitas juga bisa menjadi sumber ketegangan sosial jika tidak dikelola dengan bijaksana dan tidak adanya pemahaman multikulturalisme. Kesadaran akan multikulturalisme inilah yang menjadi pondasi penting dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman dan perbedaan.

Masyarakat multikultural, yang di dalamnya hidup berbagai kelompok identitas dengan latar belakang yang beragam, merupakan medan yang dinamis bagi demokrasi. Dalam kehidupan multikultural inilah, demokrasi hadir sebagai sistem politik yang ideal karena menjamin kesetaraan hak bagi setiap individu tanpa memandang latar belakang identitas. Keberhasilan demokrasi dalam mengelola keragaman tidak dapat dicapai semata-mata melalui regulasi dan institusi, melainkan juga memerlukan kesadaran politik yang baik dari warga negara.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman politik masyarakat sering kali masih bersifat pragmatis dan cenderung transaksional. Minimnya literasi politik, penyebaran informasi yang bias, serta rendahnya kesadaran kritis warga negara terhadap hak dan kewajiban politiknya menjadi tantangan besar dalam proses konsolidasi demokrasi. Dalam konteks ini, pendidikan politik hadir sebagai instrumen penting untuk membentuk masyarakat yang sadar akan peran dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari sistem demokrasi.

Pendidikan politik tidak hanya berfungsi untuk memberikan pengetahuan tentang sistem pemerintahan, tetapi juga membentuk sikap toleran, menghargai perbedaan, serta mendorong keterlibatan aktif dalam proses politik secara damai dan konstruktif. Di tengah dinamika masyarakat multikultural, pendidikan politik menjadi fondasi yang memperkuat kohesi sosial dan mendorong terciptanya demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis pendidikan politik dalam menumbuhkan budaya demokratis di tengah masyarakat yang majemuk, serta mengeksplorasi pendekatan-pendekatan yang relevan untuk mewujudkan partisipasi politik yang sehat dalam kerangka kehidupan multikultural.

METODE

Metode penelitian yang akan digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber yang relevan, seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan pendidikan politik yang diterapkan di Indonesia dan dijadikan sebuah pondasi demokrasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan peneliti dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pendidikan politik yang

diterapkan di Indonesia dan dijadikan sebuah pondasi demokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Multikulturalisme dan Demokrasi

Menurut Usman Pelly (2003), masyarakat multikultural merupakan masyarakat negara, bangsa, bahkan lokasi geografis terbatas seperti kota maupun sekolah, yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kebudayaan yang beragam dan berbeda-beda dalam kesederajatan (Gunawan & Rante, 2011). Di dalam masyarakat multikultural, pemahaman multikulturalisme harus tertanam di dalam masyarakatnya. Lawrence Blum mendefinisikan multikulturalisme sebagai suatu pemahaman, penghargaan serta penilaian atas budaya seseorang, serta suatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain (Munif, 2018). Kesadaran akan multikulturalisme inilah yang menjadi pondasi penting dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman dan perbedaan. Di samping itu semboyan "Bhinneka Tunggal Ika," yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu" juga menjadi alat pemersatu bangsa sebagai sarana mempersatukan keberagaman (Rahman et al., 2020).

Masyarakat multikultural, yang di dalamnya hidup berbagai kelompok identitas dengan latar belakang yang beragam, merupakan medan yang dinamis bagi demokrasi. Dalam kehidupan multikultural inilah, demokrasi hadir sebagai sistem politik yang ideal karena menjamin kesetaraan hak bagi setiap individu tanpa memandang latar belakang identitas. Menurut (Zamroni, 2013) demokrasi memiliki fungsi utama, salah satunya adalah memberikan jaminan serta menjaga hak-hak asasi warga negara seperti halnya hak untuk menyatakan pendapat, hak berserikat, hak beragama, hak untuk diperlakukan dengan setara, dan lain sebagainya. Namun perlu diingat pula, bahwasannya keberhasilan demokrasi dalam mengelola keragaman tidak dapat dicapai semata-mata melalui regulasi dan

institusi, melainkan juga memerlukan kesadaran politik yang baik dari warga negara. Hal ini karena, kurangnya pemahaman mengenai isu-isu politik dan kegiatan politik akan menyebabkan masyarakat apatis terhadap berbagai proses demokrasi serta dinamika politik pemerintahan di sekitarnya (Bashori, 2018).

Sejak merdeka, Indonesia menganut sistem demokrasi yang beragam dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia mengalami perubahan dan penyesuaian. Pada 1945-1959 Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer, tahun 1959-1965 demokrasi terpimpin, tahun 1965-1998 demokrasi pancasila, dan demokrasi pancasila (pasca reformasi 1998 - sekarang). Demokrasi di Indonesia dapat dikatakan sebagai demokrasi yang berbudaya dan juga mengakar pada kenyataan masyarakat multikultural (Prasisko, 2019). Demokrasi di masyarakat multikultural tidak hanya dituntut menjamin kebebasan sipil dan politik, tetapi juga keadilan kultural, yakni pengakuan atas eksistensi, ekspresi kebudayaan, dan kontribusi seluruh kelompok identitas tanpa diskriminasi. Kehidupan masyarakat demokrasi akan semakin baik apabila didukung oleh warga masyarakat yang semakin terdidik. Hal ini karena tingkat pendidikan warga negara memiliki korelasi yang positif dengan tingkat kehidupan demokrasi suatu bangsa (Zamroni, 2013).

Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan suatu usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik dalam masyarakat sehingga mereka memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam sistem politik yang ideal (Alfian ; 1981:235). Dengan adanya pendidikan politik, masyarakat diharapkan mampu menjadi partisipan yang bertanggungjawab secara moral, mandiri dan kritis, sadar akan politik, serta mampu meminimalisir konflik di tengah masyarakat (Saragih, 2022). Pendapat lain menyebutkan bahwa pendidikan politik atau *political forming* merupakan suatu proses pembentukan insan-insan sehingga

memahami secara mendalam serta menyadari akan status dan kedudukannya secara politik dalam kehidupan masyarakat (Sutrisman, 2019).

Lebih lanjut (Sutrisman, 2019) menjelaskan bahwa dengan adanya pendidikan politik maka akan menumbuhkan skeptisme politik dan kearifan wawasan politik mengenai peristiwa politik dengan segala jaringan-jaringannya. Skeptisme pada konteks ini diartikan sebagai skeptisme ilmiah, yaitu menghindari rasa mudah percaya dan meyakini kebenaran mitos, doktrin, maupun propaganda politik yang bersifat melenakan daya kognitif. Pendidikan politik memiliki peran krusial dalam memperkuat demokrasi dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara (Aisyah, 2023). Sejalan dengan hal tersebut (Prayugo & Prayitno, 2022) menyebutkan bahwasannya pendidikan politik bukan sekadar persoalan beropini, berpikir, serta berpendapat, akan tetapi pendidikan politik mengarah pada relasi dan aksi. Pendidikan politik sering dikaitkan dengan perbuatan nyata, sehingga pendidikan politik memiliki beberapa unsur-unsur berikut. 1) Pembentukan karakter melalui sikap, keyakinan, watak, serta kepribadian individu. 2) Praksis, aksi, serta perbuatan menuju sesuatu yang lebih baik atau transedensi bagi struktur-struktur politik dan kemasyarakatan. 3) Demokratisasi dalam segala bidang sosial kemasyarakatan dan kehidupan. 4) Kritik kemasyarakatan (Social Criticism) dan kritik-kritik terhadap kesalahan politik (Political fallacy) yang dilakukan oleh para penguasa maupun rezim parpol. 5) Adanya upaya praksis dan nyata dalam mengatasi konflik yang ditimbulkan oleh perbedaan interest serta kepentingan ideologi politik.

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya pendidikan politik bertujuan untuk menanamkan kesadaran bagi warga negaranya untuk memahami peristiwa politik dengan melihat berbagai sudut

pandangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat diverifikasi sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang benar. Apabila dikaitkan dengan masyarakat multikultural, maka pendidikan politik akan berperan dalam membantu individu memahami pentingnya toleransi, menghargai perbedaan, dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan bersama. Proses pendidikan politik yang efektif juga akan mengajarkan masyarakat untuk tidak hanya mengenali perbedaan, tetapi juga menginternalisasi nilai toleransi, menghormati hak minoritas, berpikir kritis, dan menempatkan dialog sebagai mekanisme penyelesaian konflik.

Tanpa pendidikan politik, masyarakat multikultural berisiko terjebak dalam politik identitas yang sempit, di mana loyalitas terhadap kelompok sendiri lebih dominan dibanding dengan komitmen pada kepentingan bersama. Situasi ini rawan dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik yang mengedepankan polarisasi ketimbang persatuan, sehingga stabilitas demokrasi menjadi rapuh. Sebaliknya, pendidikan politik yang inklusif memungkinkan masyarakat memahami kompleksitas kebijakan publik, berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan penuh kesadaran, serta mengembangkan sikap empatik dalam interaksi antarbudaya. Dengan demikian, pendidikan politik menjadi benteng pertama dalam mencegah lahirnya eksklusivisme dan intoleransi yang berpotensi memecah belah kehidupan berbangsa.

Di Indonesia, upaya untuk mengintegrasikan pendidikan politik telah dilakukan dengan beberapa kegiatan berikut.

1. Pembentukan “Desa Peduli Pemilu”
Program Desa Peduli Pemilu merupakan cikal bakal pendidikan politik pada lingkup sosial yang terkecil (Saragih, 2022). Program ini merupakan program yang tertuang dalam Keputusan Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan (DP3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Magetan, 2021). Program ini bertujuan untuk membangun pemahaman serta pembinaan pada masyarakat mengenai arti penting pesta demokrasi atau pemilu melalui kader di desa. Tidak hanya itu program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik di masyarakat.

2. Pendidikan Politik melalui Partai Politik

Berdasarkan Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik, menyebutkan bahwasannya beberapa substansi penting mengenai pendidikan politik dilakukan oleh parpol (partai politik). Dalam undang-undang tersebut, disebutkan “Partai politik berfungsi sebagai sarana: pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” (Nurdin, 2019). Partai politik memiliki andil yang besar dalam proses pendidikan politik dan memiliki peran dalam mengambil langkah agar dapat mengubah *image* buruk yang selama ini melekat pada partai politik tersebut.

Upaya yang dapat dilakukan oleh partai politik adalah dengan melakukan komunikasi dengan masyarakat. Dalam hal ini partai politik harus mengetahui karakteristik masyarakat terlebih dahulu untuk menentukan penyampaian materi politik. Untuk masyarakat yang sudah memiliki tingkat pemahaman dunia politik, maka dapat melaksanakan kegiatan seminar maupun dialog terbuka.

Akan tetapi, apabila karakteristik masyarakatnya memiliki keterbatasan dalam pemahaman dunia politik, maka perlu dilakukan pendekatan yang lebih persuasif dalam penyampaian materi. Dengan adanya upaya tersebut maka pendidikan politik akan tersampaikan dengan baik pada semua elemen masyarakat dan masyarakat akan terhindar dari praktik-praktik politik transaksional dan pragmatis.

3. Rumah Pintar Pemilu

Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga yang berperan dalam pendidikan politik. Menurut Undang-Undang No 15 Tahun 2011 Pasal 9 ayat (4) disebutkan KPU berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. KPU sebagai badan publik yang menyelenggarakan pemilu diwajibkan untuk mempublikasikan informasi kepemiluan kepada publik. Tidak hanya itu, menurut buku panduan pendidikan pemilih terdapat beberapa program dan strategi yang dikembangkan KPU dalam pendidikan politik. Diantaranya program tersebut adalah penggunaan teknologi informasi, pemanfaatan media massa, pemanfaatan aktifitas sosial budaya, hadirnya Rumah Pintar Pemilu (RPP), adanya relawan demokrasi dan kreasi serta lain sebagainya (Masputri et al., 2019).

Rumah Pintar Pemilu merupakan sebuah pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari bangunan ataupun bangunan khusus untuk melakukan kegiatan *project* edukasi masyarakat. Adapun tujuan umum dari Rumah Pintar Pemilu adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh

proses penyelenggaraan pemilu serta menjadi pusat informasi pemilu. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemilu dan demokrasi dengan beberapa cara, diantaranya memperkenalkan nilai-nilai dasar pemilu demokrasi bagi pra pemilu dan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya demokrasi bagi seluruh segmen masyarakat (Reza et al., 2020). Oleh karena itu, sasaran dari pendidikan politik yang dilakukan oleh Rumah Pintar Pemilu adalah seluruh segmen masyarakat tanpa terkecuali.

4. Media Sosial

Media sosial merupakan suatu yang sangat dekat dengan masyarakat di era modern ini. Media sosial memiliki pengaruh dalam dunia politik, khususnya pada komunikasi politik seperti kampanye pemilu. Dalam hal ini media sosial dianggap sebagai suatu sarana yang ideal dan basis informasi yang cukup akurat untuk mengetahui opini publik mengenai kebijakan serta posisi politik. Selain itu, media sosial juga berperan dalam membangun dukungan komunitas kepada politisi atau media perantara antara komunikator dengan komunikan secara jarak jauh dan sifatnya masif. Oleh karena itu, dengan adanya media sosial maka akan meningkatkan jaringan komunikasi publik, relasi publik, dan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu (Ratnamulyani & Maksudi, 2018).

Media sosial dipilih sebagai sebuah tempat pendidikan politik karena media sosial memiliki jangkauan luas dan biayanya murah jika dibandingkan dengan media cetak seperti pamflet, spanduk, liflet, dsb. Selain itu, di zaman modern ini media sosial digunakan oleh hampir seluruh kalangan

sehingga pendidikan politik dapat diakses dan tersampaikan kepada semua kalangan tanpa terkecuali. Internet dianggap sebagai sebuah cara yang potensial dalam mendobrak politik demokrasi massa yang menyuarakan suaranya. Tidak hanya itu internet juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi kelompok kepentingan dan sarana penyaluran opini (Juwandi et al., 2019). Akan tetapi, perlu digaris bawahi bahwasannya pendidikan politik melalui media sosial juga harus diimbangi dengan literasi digital yang baik dan kebijaksanaan dalam mengakses informasi yang tersedia. Masyarakat harus memilah dan memilih informasi yang diterima dan dikomparasikan dengan fakta yang ada. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwasannya pendidikan politik virtual melalui media sosial merupakan sarana untuk mengembangkan literasi digital masyarakat sebagai substansi pendidikan politik secara formal.

5. Pendidikan Politik melalui Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan

kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dan memiliki fungsi untuk membentuk generasi muda sebagai awal pengetahuan pendidikan politik (Kadir et al., 2024). Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang signifikan dalam memberikan kontribusi dalam pendidikan politik di sekolah. Hal ini berkaitan dengan materi yang diajarkan dalam mata pelajaran ini. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik di sekolah dapat memberikan pandangan demokrasi pelajar melalui penanaman nilai-nilai yang dapat membangkitkan kesadaran politik (Tunggal, 2023). Secara lebih lanjut menyebutkan

bahwa Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya memberikan pemahaman mengenai politik, akan tetapi juga mengajarkan bagaimana penerapan tindakan politik yang harus dilakukan (Santika et al., 2019).

SIMPULAN

Dengan banyaknya upaya yang telah dilakukan untuk mengintegrasikan pendidikan politik kepada masyarakat, maka diharapkan masyarakat Indonesia memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang politik maupun demokrasi. Dalam konteks masyarakat multikultural, pendidikan politik bukan hanya sebuah kebutuhan tambahan, melainkan fondasi esensial dalam menjaga keberlanjutan demokrasi yang sehat, adil, dan inklusif. Pendidikan politik juga berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara hak-hak individual dengan tanggung jawab kolektif, antara kepentingan kelompok dengan solidaritas kebangsaan. Tanpa adanya pendidikan politik yang merata, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi identitas, manipulasi informasi, dan praktik politik yang transaksional, yang pada akhirnya merusak sendi-sendi demokrasi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, M. (2023). Pendidikan Politik Sebagai Sarana Penguatan Demokrasi: Tinjauan Atas Praktik di Indonesia. *Literacy Notes*, 1-10. <https://liternote.com/index.php/ln/article/view/88%0Ahttps://liternote.com/index.php/ln/article/download/88/102>
- Bashori, K. (2018). Pendidikan Politik di Era Disrupsi. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 2(2), 287-310. <https://doi.org/10.32533/02207.2018>
- Gunawan, K., & Rante, Y. (2011). Manajemen Konflik Atasi Dampak Masyarakat Multikultural di Indonesia. *Jurnal Mitra Ekonomi Dan*

- Manajemen Bisnis*, 2(2), 212–224.
- Juwandi, R., Nurwahid, Y., & Lestari, A. (2019). Media Sosial Sebagai Sarana Pendidikan Politik Untuk Mengembangkan Literasi Digital Warga Negara. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP Untirta*, 2(1), 369–378.
- Kadir, D., Hidayati, A., Irwan, & Rizal, A. (2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Media Pendidikan Politik dalam Membangun Karakter Peserta Didik di Sekolah Kabupaten Maros. 7, 17789–17798.
- Magetan, D. K. (2021). *Program Desa Peduli Pemilu Untuk Perubahan di Indonesia*.
- Masputri, M. E., Rafni, A., & Dewi, S. F. (2019). Upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Menjadikan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik. *Jurnal Civic Education*, 2(1), 67–75.
- Nurdin, P. H. (2019). Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik. *Jambura Law Review*, 1(2), 144–166.
<https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.1977>
- Prasisko, Y. G. (2019). Demokrasi Indonesia dalam Masyarakat Multikultural. *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan*, 1–12.
- Prayugo, A., & Prayitno, R. B. P. (2022). Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(3), 427–442.
<https://doi.org/10.62775/edukasia.v3i3.138>
- Rahman, M. F., Najah, S., Furtuna, N. D., & Anti. (2020). Bhineka Tunggal Ika sebagai Benteng Terhadap Resiko Keberagaman Bangsa Indonesia. *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*.
- Ratnamulyani, I. A., & Maksudi, B. I. (2018). Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula di Kalangan Pelajar di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 20(2), 154–161.
- Reza, S. T. A., Amirrullah, M. R., & Mulyadi, A. (2020). Strategi KPU Kota Sukabumi Dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Pemilih Melalui Rumah Pintar Pemilu Tahun 2019. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Admimistrasi Negara*, 7(2), 315–322.
- Santika, I. G. N., Purnawijaya, I. P. E., & Sujana, I. G. (2019). Membangun Kualitas Sistem Politik Demokrasi Indonesia Melalui Pemilu Dalam Perspektif Integrasi Bangsa Dengan Berorientasikan Roh Ideologi Pancasila. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Saragih, A. B. (2022). *Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat Guna Mewujudkan Konsolidasi Demokrasi*. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Sutrisman, D. (2019). *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Guepedia.com.
- Tunggal, S. (2023). *Membangun Kesadaran Politik Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. 1(1), 11–15.
- Zamroni. (2013). *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural*. Penerbit Ombak.
- Aisyah, M. (2023). Pendidikan Politik Sebagai Sarana Penguatan Demokrasi: Tinjauan Atas Praktik di Indonesia. *Literacy Notes*, 1–10.
<https://liternote.com/index.php/ln/article/view/88%0Ahttps://liternote.com/index.php/ln/article/download/88/102>
- Bashori, K. (2018). Pendidikan Politik di Era Disrupsi. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 2(2), 287–310.
<https://doi.org/10.32533/02207.2018>
- Gunawan, K., & Rante, Y. (2011). Manajemen

- Konflik Atasi Dampak Masyarakat Multikultural di Indonesia. *Jurnal Mitra Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 2(2), 212–224.
- Juwandi, R., Nurwahid, Y., & Lestari, A. (2019). Media Sosial Sebagai Sarana Pendidikan Politik Untuk Mengembangkan Literasi Digital Warga Negara. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP Untirta*, 2(1), 369–378.
- Kadir, D., Hidayati, A., Irwan, & Rizal, A. (2024). *Peran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Media Pendidikan Politik dalam Membangun Karakter Peserta Didik di Sekolah Kabupaten Maros*. 7, 17789–17798.
- Magetan, D. K. (2021). *Program Desa Peduli Pemilu Untuk Perubahan di Indonesia*.
- Masputri, M. E., Rafni, A., & Dewi, S. F. (2019). Upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Menjadikan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik. *Jurnal Civic Education*, 2(1), 67–75.
- Nuridin, P. H. (2019). Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik. *Jambura Law Review*, 1(2), 144–166. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.1977>
- Prasisko, Y. G. (2019). Demokrasi Indonesia dalam Masyarakat Multikultural. *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan*, 1–12.
- Prayugo, A., & Prayitno, R. B. P. (2022). Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(3), 427–442. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v3i3.138>
- Rahman, M. F., Najah, S., Furtuna, N. D., & Anti. (2020). Bhineka Tunggal Ika sebagai Benteng Terhadap Resiko Keberagaman Bangsa Indonesia. *Al-Din : Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*.
- Ratnamulyani, I. A., & Maksudi, B. I. (2018). Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula di Kalangan Pelajar di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 20(2), 154–161.
- Reza, S. T. A., Amirrulah, M. R., & Mulyadi, A. (2020). Strategi KPU Kota Sukabumi Dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Pemilih Melalui Rumah Pintar Pemilu Tahun 2019. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 315–322.
- Santika, I. G. N., Purnawijaya, I. P. E., & Sujana, I. G. (2019). Membangun Kualitas Sistem Politik Demokrasi Indonesia Melalui Pemilu Dalam Perspektif Integrasi Bangsa Dengan Berorientasikan Roh Ideologi Pancasila. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Saragih, A. B. (2022). *Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat Guna Mewujudkan Konsolidasi Demokrasi*. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Sutrisman, D. (2019). *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Guepedia.com.
- Tunggal, S. (2023). *Membangun Kesadaran Politik Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. 1(1), 11–15.
- Zamroni. (2013). *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural*. Penerbit Ombak.